



Network Governance dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang

Nurul Hasanah ^{1*}, Fitri Kurnianingsih ², Chaereyranba Sholeh ³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Korespondensi Penulis: nurullhasanaaahhh@gmail.com

Abstract: Tanjungpinang City in the Riau Islands has tourism potential, but the number of tourists has decreased due to the COVID-19 outbreak and has not fully recovered. The revitalization of Kota Lama Tanjungpinang is one of the efforts to increase tourist attractiveness by involving the active role of the community through network governance. This research aims to understand Network Governance in the development of community-based tourist destinations in Kota Lama Tanjungpinang, as well as its obstacles and success factors. Using a qualitative approach with observation, interviews, and documentation. In conclusion, this study found that coordination between the government, NGOs (Non-Governmental Organization), and the community was effective but not optimal. This research suggests increasing cooperation and coordination between the government and related parties in the development of community-based tourist destinations in Kota Lama Tanjungpinang.

Keywords: Network Governance, Tourism, Community Based Development.

Abstrak: Kota Tanjungpinang di Kepulauan Riau memiliki potensi pariwisata, tetapi jumlah wisatawan menurun akibat wabah COVID-19 dan belum sepenuhnya pulih. Revitalisasi Kota Lama Tanjungpinang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui jejaring tata kelola pemerintahan (*network governance*). Penelitian ini bertujuan untuk memahami *Network Governance* dalam pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang, serta hambatan dan faktor keberhasilannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antara pemerintah, NGOs (*Non-Governmental Organization*), dan masyarakat sudah efektif namun belum optimal. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait dalam pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang.

Kata kunci: Network Governance, Pariwisata, Pengembangan Berbasis Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Pengembangan pariwisata berarti mendorong sumber daya wisata, bukan mengeksploitasi mereka secara besar-besaran dalam jangka pendek. Semua orang, termasuk generasi berikutnya, akan mendapat manfaat dari pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Selain keseimbangan dan berkelanjutan dalam komponen ekologi dan ekonomi, pengembangan pariwisata di Indonesia pada umumnya dan di daerah pada khususnya berfokus pada pariwisata yang berorientasi pada keseimbangan pengembangan wilayah dan bertumpu pada masyarakat yang memberdayakan (Mandala et al., 2022).

Pariwisata membantu masyarakat di daerah wisata mendapatkan pekerjaan, dimana satu dari delapan pekerja di dunia bergantung pada pariwisata secara langsung atau tidak langsung. Hal ini tentu dapat meminimalisir tingkat pengangguran disuatu daerah tersebut. Pariwisata juga menjadi faktor bagi pertumbuhan ekonomi yang

diharapkan akan terus mengalami peningkatan. Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) yang juga merupakan pusat wisatawan lokal dan internasional (Jumardito & Wulandari, 2022).

Dalam pendekatan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sering kali menjadi pilihan pertama. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat dicapai dalam dua cara, yaitu melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan melalui pembagian manfaat pariwisata. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan berarti masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan harapan, keinginan, dan kekhawatirannya tentang pembangunan pariwisata, yang kemudian dapat digunakan sebagai masukan dalam proses perencanaan pariwisata. Sedangkan mengambil peran dalam pembagian manfaat pariwisata berarti bahwa masyarakat seharusnya memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pariwisata dan keterkaitan dengan industri lainnya. Selanjutnya, pengembangan destinasi pariwisata seharusnya mampu memberikan peluang pekerjaan, kesempatan untuk berusaha, dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan serta pendidikan bagi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati manfaat dari pariwisata. Pemberdayaan masyarakat juga dianggap sebagai salah satu model pendekatan yang sangat efektif dalam pembangunan kepariwisataan untuk mendorong partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan, khususnya masyarakat setempat. Sektor pariwisata adalah salah satu andalan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan masyarakat. Masyarakat adalah unsur penting pemangku kepentingan untuk bersama-sama dengan pemerintah bersinergi melaksanakan dan mendukung pariwisata berkelanjutan di kota Tanjungpinang.

Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat di Kota Lama masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama adalah menurunnya jumlah wisatawan dipengaruhi oleh kurangnya promosi dan penyelenggaraan event wisata di Kota Tanjungpinang, event yang diselenggarakan kurang variatif atau tidak cukup menarik bagi berbagai segmen wisatawan, hal ini bisa mempengaruhi minat wisatawan untuk datang dan berpartisipasi. Lalu kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan pariwisata seperti toko cenderamata, dan lain-lain di Kota Lama. Lalu kurangnya pelibatan biro perjalanan sebagai sarana transportasi massal karena banyaknya jumlah wisatawan yang bepergian secara kelompok, dan moda yang digunakan adalah bus dan sarana angkutan kota menuju tempat dan objek wisata sangat terbatas. Hal lainnya yang bersangkutan dengan sarana dan prasarana ini adalah

minimnya sarana hiburan malam di Kota Tanjungpinang. Tempat-tempat santai dan menghibur diri di kota ini seperti karaoke dan restoran sangat minim dan tempat hiburan dan makanan tersebut terbatas jumlahnya sehingga tidak cukup banyak pilihan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke kota ini. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam peningkatan pelayanan akomodasi kepada wisatawan. Lalu minimnya pusat informasi di lokasi wisata menyulitkan responden untuk mengetahui secara mendetail tentang objek dan atraksi wisata yang dikunjungi dan dilihatnya. Tidak hanya itu kurangnya peran penyelenggara wisata (biro perjalanan) dan masyarakat dalam penyediaan paket wisata dikarenakan kendala yang dialami oleh biro perjalanan dalam menawarkan paket wisata Kota Tanjungpinang seperti minimnya transportasi, minimnya akomodasi, minimnya promosi, minimnya hiburan, dan minimnya atraksi wisata.

Pada pembangunan destinasi wisata Kota Lama pemerintah membutuhkan peran dari masyarakat setempat untuk bekerja sama mengelola kawasan tersebut agar nantinya dapat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan dan akan tumbuh menjadi sumber perekonomian di Kota Tanjungpinang. Hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat membentuk suatu kerangka yang dinamakan dengan jejaring. Jejaring yang dilakukan oleh instansi yang telah disebutkan di atas akan membentuk suatu jejaring yang secara teoritis disebut dengan tata kelola jaringan pemerintahan (*network governance*). Adanya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Bertuah dan Cermin Indah berperan dalam mengelola kawasan tempat mereka tinggal agar dapat menjadi salah satu tempat wisata yang dapat dikunjungi.

2. KAJIAN TEORITIS

Governance

Menurut (Rohman, 2009) *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut (Koiman, 2009) *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Governance banyak dipergunakan sebagai padanan untuk menggantikan istilah “administrasi publik” atau setidaknya tidaknya merujuk pada padanannya cukup banyak

(Peters & Savoie, 1995). Istilah “*governance*” sebagai bentuk kata ganti dari “*government*”, pemahaman ini sangat umum ditemukan akan tetapi perlu dipahami bahwa “*governance*” bukanlah sinonim dari “*government*”. *Governance* memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, 2018).

United National Development Program (UNDP, 1997) mendefinisikan *governance* sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Asian Development Bank (ADB, 1995) mendefinisikan *Governance* (kepemerintahan) sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan prediksisibilitas dapat diperkirakan dengan jelas. (World Bank, 1997) mendefinisikan *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara.

Network Governance

Menurut Lay dan Masudi dalam (Pambudi et al., 2022) *Network governance* merupakan praktik atau model baru dalam tata kelola yang menekankan pada aspek jaringan untuk membentuk kerjasama dengan melibatkan lembaga di luar Pemerintah, baik swasta maupun public. *Network* sendiri memiliki definisi yaitu Pola hubungan sosial yang stabil antara aktor, institusi, atau lembaga yang saling memiliki ketergantungan pada area masalah kebijakan atau kelompok sumber daya yang meliputi membentuk, memelihara, mengarahkan atau menjaga, dan mengubah suatu situasi melalui serangkaian langkah atau peristiwa. Melihat definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Network* merupakan suatu resiprokal atau yang biasa disebut hubungan timbal balik. Hubungan tersebut terjadi diantara berbagai aktor, institusi, atau lembaga negara yang dalam hal ini sebagai stakeholders yang terlibat dalam suatu serangkaian pada proses pengambilan suatu keputusan (Yudiatmaja et al., 2017).

Menurut De Francesco dkk dalam (Hijr et al., 2021) Tata kelola jaringan pemerintahan atau *Network Governance* adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama antara entitas pemerintahan (negara dan aktor di luar negara) melalui pembentukan tatanan pribadi dan untuk merancang sebuah mekanisme jejaring baik dalam bentuk kontrak ataupun non-kontrak dan memungkinkan untuk mengikat mitra kerja dalam sebuah aturan yang tertulis.

Pariwisata Berbasis Masyarakat

Menurut Murphy dalam (Hadiwijoyo, 2018) Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berarti bahwa produk pariwisata diartikulasikan dan dikonsumsi secara lokal. Dengan demikian, produk pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari produk pariwisata, dan industri juga harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Sebab, masyarakat lokal lah yang akan mengalami dampak terus-menerus dari pertumbuhan pariwisata, dan mereka memerlukan lebih banyak pengetahuan tentang cara masyarakat dikemas dan dipromosikan sebagai produk pariwisata. Untuk mendapatkan keuntungan dari pariwisata, masyarakat lokal harus terlibat. Ini akan mendukung pengembangan pariwisata, dimana masyarakat akan memberikan pelajaran dan menunjukkan sejarah dan keunikan lokal.

Menurut Timothy dan Boyd dalam (Made & Adikampana, 2017) yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata dikenal sebagai pariwisata berbasis masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat dicapai dalam dua cara, yaitu melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan melalui pembagian manfaat pariwisata. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan berarti masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan harapan, keinginan, dan kekhawatirannya tentang pembangunan pariwisata, yang kemudian dapat digunakan sebagai masukan dalam proses perencanaan pariwisata. Sedangkan mengambil peran dalam pembagian manfaat pariwisata berarti bahwa masyarakat seharusnya memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pariwisata dan keterkaitan dengan industri lainnya. Oleh karena itu, pengembangan destinasi pariwisata seharusnya mampu memberikan peluang pekerjaan, kesempatan untuk berusaha, dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan serta pendidikan bagi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati manfaat dari pariwisata.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kota Lama dipilih sebagai lokasi penelitian karena ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu destinasi wisata berbasis masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Data yang digunakan meliputi data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dan data sekunder lewat dokumen dan berita-berita dari media cetak maupun online, skripsi, thesis, disertasi, karya ilmiah seperti artikel dan jurnal, dan berita yang ditulis baik di media cetak maupun online (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi. Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman dalam (Kurniawan, 2018), yaitu analisis interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk meninjau dan memvalidasi temuan.

Peneliti memfokuskan pada *Network Governance* dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang dengan menggunakan indikator dalam teori jejaring kebijakan menurut (Waarden, 1992) yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Kelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan dan Strategi Aktor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang jejaring kebijakan dalam pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang. Adapun hasil penelitian yang telah didapatkan melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan, yaitu sebagai berikut:

Aktor

Dalam proses sebuah kebijakan, aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat (*participants*). Faktor ini kemudian menentukan ukuran dari jaringan yang akan dibangun. Serta karakteristik jaringan akan dipengaruhi oleh tipe aktor dari latar belakang yang berbeda-beda. Aktor dalam jaringan kebijakan merupakan individu-individu namun dapat juga berupa organisasi sebagaimana aktor yang terlibat dapat juga sebagai representasi dari kelompok atau pihak tertentu. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Dinas Pariwisata, Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata, Organisasi Non Pemerintah dalam hal ini Asosiasi Pariwisata Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Kelompok masyarakat dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bukit Cermin dan Bertuah serta masyarakat Kota Lama.

Disisi lain peneliti menemukan tidak adanya keterlibatan aktif dari pihak masyarakat dalam pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang serta dunia usaha pun belum ikut terlibat dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama.

Fungsi

Fungsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh aktor di dalam jejaring yang bertujuan membentuk arus komunikasi yang dapat diilustrasikan ke dalam beberapa fungsi umum seperti pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kerjasama antar aktor yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan publik, baik pada tahapan formulasi maupun implementasi. Berikut ini adalah fungsi masing-masing aktor dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang pada Tabel 1.

Tabel 1. Fungsi Aktor

Aktor	Akses dalam Pengambilan Keputusan	Pertukaran Informasi	Pertukaran Sumber Daya	Kerja Sama
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembuat dan pelaksana kebijakan	Ada	Program dan anggaran	Ada
Pemerintah Kota Tanjungpinang	Pelaksana kebijakan	Ada	Pengembangan SDM dan penyediaan saluran informasi dan promosi event-event pariwisata	Ada
Organisasi Non Pemerintah	Pelaksana Kebijakan	Ada	Promosi destinasi wisata dan pemantapan SDM	Ada
Kelompok Masyarakat	Pelaksana Kebijakan	Ada	Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata dan mengadakan event-event wisata di Kota Lama	Ada

Sumber: Hasil Wawancara (2024)

Struktur

Struktur merupakan bagian penting karena dapat menjelaskan situasi jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan dalam pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama dapat dilihat dari strukturnya berdasarkan pada, tipe keanggotaan (type of membership), jenis koordinasi (type of coordination), dan kondisi hubungan (nature of the relations). Tabel berikut menggambarkan struktur jaringan pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama.

Tabel 2. Struktur Jaringan

Actors	Type of Membership	Type of Coordination	Nature of The Relations
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Wajib	Fasilitasi, koordinasi dan komunikasi	Kooperatif
Pemerintah Kota Tanjungpinang	Wajib	Fasilitasi, koordinasi dan komunikasi	Kooperatif
Organisasi Non Pemerintah	Sukarela	Fasilitasi	Kooperatif
Kelompok Masyarakat	Sukarela	Komunikasi	Kooperatif

Sumber: Data olahan peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa hanya Pemerintah Kota Tanjungpinang dan pada Kelompok Masyarakat (Pokdarwis) yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat Kota Lama. Partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat masih rendah. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program ini disebabkan kurang maksimalnya pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama selain itu untuk masyarakatnya sendiri masih kurang kesadaran dalam hal menjaga keindahan dan menjaga kebersihan untuk satu lingkungan yang ada di lokasi mereka ini sendiri. Tipe koordinasi yang dilakukan antar Pemerintah dengan para aktor bersifat fasilitasi, koordinasi dan komunikasi.

Kelembagaan

Upaya pelebagaan jaringan kebijakan yang ditemukan berupa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Ketua Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata saat ini cukup dengan adanya Disbudpar, karena Disbudpar sebagai koordinator yang mengkoordinasi, mengundang instansi-instansi sesuai tupoksinya, sebagai wadah kerjasama. Kelembagaan yang ada belum

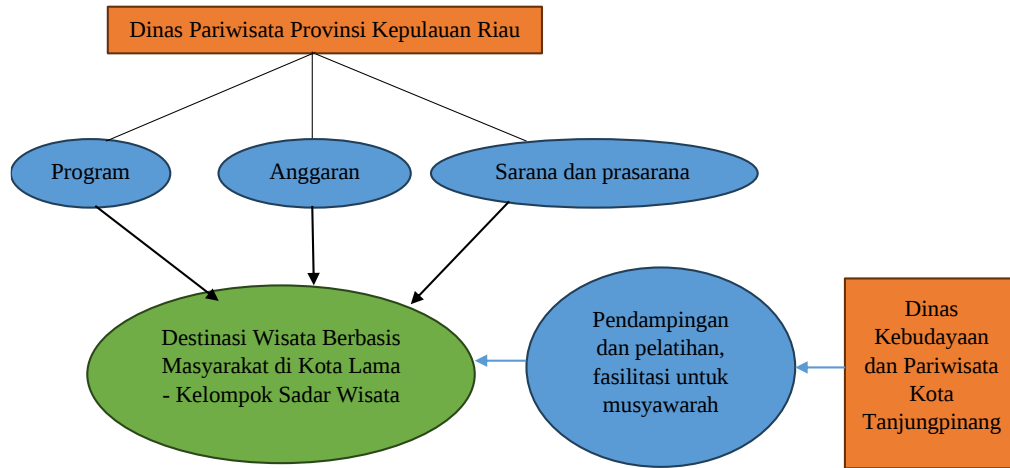
melibatkan aktor lainnya seperti akademisi, dunia usaha/bisnis. Artinya, kelembagaan yang terbentuk masih dalam tingkat yang rendah, padahal sebagaimana dikemukakan Waarden (1992) bahwa semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan maka akan semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut.

Aturan Bertindak

Aturan bertindak berbicara tentang aturan main atau kebiasaan (*habit*) yang terdapat pada pola interaksi aktor-aktor di dalam jaringan kebijakan. Fragmentasi aktor terjadi pada proses pelaksanaan program. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Dinas Pariwisata memberikan dukungan anggaran dan program. Pemerintah kota Tanjungpinang yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pendampingan dan pelatihan kepada para kelompok masyarakat serta memberikan fasilitas untuk para aktor bermusyawarah. Organisasi non pemerintah yaitu Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) melakukan promosi dan pemantapan SDM. Kelompok masyarakat yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Cermin Indah melakukan kolaborasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bertuah untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Kota Lama serta mengadakan event-event wisata. Pola interaksi yang terbangun adalah koordinasi, fasilitasi dan komunikasi. Dari hasil wawancara, tidak ada aturan yang terlalu mengikat. Para aktor melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab mereka.

Hubungan Kekuasaan

Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah *power relation* yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Proses ini berwujud sebagai fungsi distribusi sumber daya (*resources*) dan kebutuhan (*needs*) di antara aktor-aktor. Dalam pembagian kekuasaan pelaksanaan Pengembangan Destinasi Wisata di Kota Lama, para Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki peran strategis, karena para anggota kelompok inilah yang akan menggerakkan masyarakat agar mampu memetakan masalah dan kebutuhan solusi bagi pengembangan destinasi wisata di Kota Lama, mampu menyusun perencanaan dan mampu melaksanakan program di lapangan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku penggagas dan pembuat kebijakan membantu dengan menyediakan anggaran, sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara, pembagian tugas atau kekuasaan dianggap sudah baik dan efektif. Mereka melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama.



Gambar 1. Pola Hubungan Kekuasaan

Sumber: Data olahan peneliti (2024)

Strategi Aktor

Strategi yang dilakukan oleh para aktor dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama adalah mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat, seperti mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kota Lama, lalu Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau menyediakan anggaran Sarana dan Prasarana Program Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang menyediakan pendampingan dan pelatihan, dan memfasilitasi untuk musyawarah. Kelompok sadar wisata ikut serta dalam pengadaan event-event wisata yang ada di Kota Lama. Para aktor ini pada dasarnya sudah cukup baik dan mempunyai kemampuan serta patuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Jejaring Kebijakan dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama, belum efektif melalui teori Van Warden yang dikaji tujuh faktor yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Institusi Kelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan dan Strategi Aktor menunjukkan:

1. Berdasarkan Teori Van Warden terdapat 4 Faktor yang mendukung Jejaring Kebijakan padahal dapat efektif apabila ke tujuh faktor dapat terwujud dan saling berkaitan yaitu : Faktor Aktor, Faktor Fungsi, Faktor Struktur dan Institusi Kelembagaan sudah efektif berperan baik berjalan sebagaimana mestinya membawa dampak positif pada efektifitas terbangunnya jaringan struktur dalam Pengembangan Destinasi Wisata di masyarakat serta Pelembagaan sudah terjadi dan dilakukan melalui kegiatan koordinasi, komunikasi dan musyawarah.

2. Adapun yang belum terlaksana dan terabaikan padahal menjadi pokok dalam Teori Van Warden selayaknya dapat terpenuhi yaitu : Faktor Aturan Bertindak, Regulasi dibuat untuk menjamin setiap pelaku program menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Di Kota Tanjungpinang belum adanya Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah terkait program Pengembangan Destinasi Wisata, Faktor Hubungan Kekuasaan menjadi penting agar proses pendistribusian kekuasaan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan berlangsung secara harmonis dan proporsional sehingga tidak terjadi tumpang tindih program. Dan Faktor Aktor Strategis yang dapat menjalankan jejaring kebijakan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang selaku koordinator belum efektif yaitu mensinergikan Partisipan yang terlibat secara langsung dalam sebuah program kegiatan yang memberi kontribusi terhadap keberhasilan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai produk kebijakan publik melibatkan partisipan yakni *Government, Civil Society, Private sector, NGO (Non-Governmental Organization)* dan *Social Media*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk mengetahui jejaring kebijakan dalam implementasi Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang.

1. Dalam menjalankan program, diharapkan masyarakat agar lebih berkontribusi dan memberikan support terhadap pengembangan destinasi wisata yang ada di Kota Lama.
2. Untuk jaringan yang sudah ada, tetap menjadi acuan untuk program yang selanjutnya.
3. Dengan adanya program pengembangan ini, diharapkan Kota Lama ini dapat dikenal oleh khalayak luas dan menjadi contoh untuk program pengembangan destinasi wisata lainnya.
4. Untuk pemerintah diharapkan agar lebih memberikan pengarahan mengenai pengembangan destinasi wisata di Kota Lama.

6. DAFTAR REFERENSI

- Asian Development Bank. (1995). *Governance: Sound development management*. Asian Development Bank. <https://books.google.co.id/books?id=Mb2uOwAACAAJ>
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu administrasi publik di Indonesia: Mencari identitas?* Gadjah Mada University Press. https://books.google.co.id/books?id=m_SrzQEACAAJ

- Hadiwijoyo, S. S. (2018). *Perencanaan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat* (1st ed.). Suluh Media.
- Hijr, Y. S., Kamil, M., Sadewo, B., Taqwa, I., & Sihidi. (2021). Network governance dalam pemenuhan ketersediaan pangan di Kota Malang. *Jurnal Tata Sejuta*, 7(2).
- Jumardito, B., & Wulandari. (2022). Strategi pemasaran objek wisata bahari Pantai Tanjung Siambang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 137.
- Koiman. (2009). *Prinsip transparansi, prinsip peduli pada stakeholder*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, A. (2018). *Metodologi penelitian pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Made, I., & Adikampana. (2017). *Pariwisata berbasis masyarakat*. Cakra Press.
- Mandala, E., Rinah, S. A., Effendi, D., & Sanjaya, I. D. (2022). Strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal di Kampung Tanjung Siambang Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. *JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji) STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang*, 3(2), 718.
- Nations, D. P. U. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme. <https://books.google.co.id/books?id=i5nJJwAACAAJ>
- Pambudi, S. S. I., Hakim, M. L., & Lesmana, S. Y. (2022). Tata kelola jaringan terhadap kebijakan pengembangan desa wisata Podokoyo Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, VI(2), 239.
- Peters, B. G., & Savoie, D. J. (1995). *Governance in a changing environment*. McGill-Queen's University Press. https://books.google.co.id/books?id=8NqYKrKq_vQC
- Pleskovic, B., & Stiglitz, J. E. (1997). *Annual World Bank Conference on Development Economics 1997*. World Bank. <https://books.google.co.id/books?id=t-yAAAAIAAJ>
- Rohman, A. (2009). *Politik ideologi pendidikan*. Mediatama.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Van Waarden, F. (1992). *Dimensions and types of policy networks*. Kluwer Academic Publishers.
- Yudiatmaja, W. E., Safitri, D. P., & Manalu, A. M. R. (2017). Inovasi kebijakan dan pemerintah jaringan di era desentralisasi: Studi kasus Perda Kota Batam no.4 tahun 2015. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 7, 612–631. <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4516-kementerian->